

Studi Konstitusi dan Lembaga Negara

Penulis

Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP.,M.AP

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Studi Konstitusi dan Lembaga Negara

Penulis : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP.,M.AP

Editor : Yuan Anisa, S.Si.,M.Si

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

SINOPSIS

Konstitusi tak bisa dipisahkan dari konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa kekuasaan pemerintah itu terbatas dan hak-hak rakyat terjamin melalui konstitusi. Konstitusionalisme muncul dari pemahaman bahwa pemerintah itu dibentuk oleh dan untuk rakyat, namun kekuasaannya perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan.

Dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan bersama (konsensus) mayoritas rakyat tentang bagaimana negara seharusnya dibangun. Kesepakatan ini penting agar kepentingan bersama dapat dilindungi dan diwujudkan melalui negara. Konsensus modern ini umumnya mencakup tiga hal:

- Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama sebagai gambaran abstrak dari kepentingan seluruh warga negara yang beragam.
- Kesepakatan tentang rule of law (negara hukum) sebagai landasan penyelenggaraan negara. Ini berarti semua tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan yang disepakati.

- Kesepakatan tentang bentuk lembaga negara dan prosedur ketatanegaraan, termasuk hubungan antar lembaga dan antara negara dengan warga negara.

Demokrasi konstitusi dibangun atas ide bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Seperti yang dikatakan Lord Acton, "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut sangat korup." Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan negara diwujudkan dalam bentuk konstitusi tertulis. Kekuasaan perlu dibagi agar peluang penyalahgunaan menjadi lebih kecil, yaitu dengan menyerahkan kekuasaan kepada beberapa orang atau lembaga.

KATA PENGANTAR

Konstitusi adalah tiang fundamental bagi setiap negara modern yang merinci bagaimana kekuasaan diatur, hak-hak warga negara dilindungi, dan tujuan bernegara diwujudkan. Lembaga-lembaga negara, pada gilirannya, adalah instrumen yang mewujudkan cita-cita konstitusional tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Memahami keduanya secara komprehensif sangat esensial bagi siapa saja yang ingin menyelami fondasi tata negara, mengkritisi kebijakan publik, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Buku "Studi Konstitusi dan Lembaga Negara" ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seluk-beluk konstitusi dan interaksi dinamis antarlembaga negara. Dimulai dari konsep dasar hingga perbandingan lintas negara, buku ini bertujuan untuk memperkaya wawasan pembaca tentang pentingnya konstitusi sebagai kontrak sosial dan peran vital lembaga-lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, ilmu politik, administrasi publik, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang memiliki minat mendalam pada bidang hukum tata negara dan ilmu pemerintahan. Semoga buku ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menginspirasi pemikiran kritis dan partisipasi aktif dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Signifikan Mempelajari Konstitusi dan Lembaga Negara	121
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	14
BAB II	15
KONSEP TEORITIS DAN KONSTITUSIONALISME.....	15
2.1 Konsep teoritis.....	15
2.2 Sejarah Konstitusionalisme	19
2.3 Makna Konstitusi	23
BAB III.....	28
KEDUDUKAN, SIFAT DAN MATERI MUATAN KONSTITUSI.....	28
3.1 Kedudukan Konstitusi.....	28
3.2 Sifat Konstitusi	31
3.3 Materi Muatan Konstitusi	32
BAB IV	34
NILAI DAN BUDAYA BERKONSTUSI	34
4.1 Nilai Berkonstitusi	34
4.2. Budaya Konstitusi	36
4.3 Budaya Berkonstitusi	42
BAB V.....	44
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAH	44
5.1 Bentuk Negara.....	44
5.2 Sistem Pemerintahan.....	53
BAB VI	57

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	57
6.1 Hubungan Antar Lembaga.....	57
6.2 Lembaga Legislatif	63
6.3 Lembaga Eksekutif.....	64
6.4 Lembaga Yudikatif.....	65
6.5 Lembaga Lainnya dan Mekanisme Checks and Balances	66
BAB VII.....	68
PERBANDINGAN KONSTITUSI	68
7.1 Perbandingan Konstitusi	68
7.2 Metode Perbandingan Konstitusi	72
7.3 Studi Kasus Konstitusi Negara-negara.....	73
7.4 Pola-pola Umum dan Perbedaan Signifikan	75
7.5 Pengaruh Konstitusi Global terhadap Konstitusi Nasional	76
BAB VIII.....	81
MASA DEPAN KONSTITUSI ANTAR NEGARA	81
8.1 Tantangan Konstitusi di Era Globalisasi	85
8.2 Peran Konstitusi dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi	87
8.3 Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi	87
8.4 Demokratisasi dan Perubahan Konstitusional	88
8.5 Prediksi dan Harapan untuk Konstitusi di Masa Depan	89
BAB IX	90
PENUTUP	90
REFERENSI	96
1. Buku	96
2. Peraturan Perundang-undangan.....	102